

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrizal Sutan Kayo, *Audit Forensik Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing , Depok, 2010.
- Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta 2015.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mondar Maju, Jakarta, 2001.
- Surachmin, *Strategi Korupsi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2013.

Peraturan perundang-undangan

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 *tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;*
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 *tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah KUHP.*
- , Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.*
- , Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana.*
- , Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;*
- , Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;*
- , Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara ;*
- , Nomor 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Negara ;*
- , Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;*

-----, Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* ;
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dan PP Nomor 41 Tahun
1964 tentang *Perubahan dan Tambahan PP Nomor 224 Tahun
1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian
Ganti Kerugian.*
-----, Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
-----, Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.*
-----, Nomor 40 Tahun 1996 Tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.*
-----, Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan.*
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2006 Tentang *Ketentuan Pelaksanaan PP 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT ;*
-----, Nomor 7 Tahun 2007 tentang *Panitia Pemeriksa Tanah.*

Sumber lain

Berkas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal
13 Desember 2016.
“*Kamus Besar Bahasa Indonesia,*” Pusat Bahasa Indonesia Departemen
Pendidikan Nasional, Jakarta, Edisi Keempat Tahun 2008.